



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 8 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAGELANG TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum
Kota Magelang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dyah Dwi Safitri



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR
9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
TAHUN 2022**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBW/WBBMKPU																	
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja / Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja / Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kota Magelang	SK Tim Kerja ZI tahun 2022 / Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Magelang; dan Prosedur pemilihan Tim Kerja ZI				√										TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan website KPU Kota Magelang				√										
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBKfWBBM (per semester / per triwulan	Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut						√		√			√		√	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBKMBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar hadir, Banner Budaya Kerja				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Telah menetapkan agen perubahan.	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan				√										

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II Penataan Tata Laksana																	
1	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan; 2) SOP tersedia di ruang pelayanan; 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	1) Sosialisasi sop Alur Kerja KPU Kota Magelang 2) Screenshoot/foto ketersediaan SOP Laporan rapat evaluasi SOP				√	√								TIM PENGUATAN TATA LAKSANA
2	E- Office Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Surat Edaran KPU terkait Pelaporan harian masa Covid 19 dan Draft juknis	Aplikasi presensi berbasis aplikasi				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilihan	Aplikasi JDIH, PPID,Lindungihakmu KPU Kota Magelang, website KPU Kota Magelang, media sosial KPU Kota Magelang.				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) KPU Kota Magelang menerapkan keterbukaan informasi publik	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam piagam penghargaan				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2) KPU Kota Magelang menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu														
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kota Magelang	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi												√	√

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
III	Penataan Sistem Manajemen SDM																	
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan Kebutuhan Pegawai					√								TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	
2	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan rotasi internal	SK mutasi	√													
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan pola rotasi	SK Promosi/ Rotasi Jabatan			√											
		Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	1) Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat 2) Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	√													
3	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/bimtek dari KPU Kota Magelang ke Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI	√		√		√						√			
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Rapat pembahasan kebutuhan, pendidikan dan pelatihan, bimtek pegawai	Usulan diklat/bimtek dari KPU Kota Magelang ke KPU Provinsi Jawa Tengah						√								
		Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai	Instrumen penilaian pegawai dan laporan evaluasi kinerja							√							√

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti				√									
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau mentoring dll Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi, mengikutsertakan pegawai pada pelatihan intenel, mengadakan Bimtek	Usulan diklat/bimtek dari KPU Kota Magelang ke KPU Provinsi Jawa Tengah, Laporan penyelenggaraan pelatihan internal,						√							
			Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Formulir monitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan													√
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Menetapkan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2022 dan Sasaran Kinerja Pegawai Eselon III dan IV tahun 2022	Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2022 Sasaran Kinerja Pegawai Eselon III dan IV tahun 2022	√												
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasan	Penilaian SKP tahun 2021 dan Penetapan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2022 SKP Eselon III dan IV	SKP Tahun 2021 dan PK Eselon III dan IV tahun 2022 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2022	√												
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja tahunan													√

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai berprestasi; Tim Penilai. Kriteria yang jelas	penetapan pegawai berprestasi								√						
5	Penegakan aturan kode etik dan aturan perilaku pegawai	Aturan kode etik dan aturan perilaku pegawai telah dilaksanakan/ diimplementasikan	Kode etik dan aturan perilaku pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai	laporan pelaksanaan sosialisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai, dan rekapitulasi tunjangan kinerja pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
IV	Penguatan Akuntabilitas																	
1	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Kota Magelang memberikan pengarahan dan menandatangani RKKL 2022	RKKL 2022	√													TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kota Magelang terlibat dalam penyusunan	Dokumen RENSTRA KPU,	√													
			RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kota Magelang	√													
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja					√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kota Magelang	√													
		dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	√													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1		terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	√													
		laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2021	LAKIP KPU Kota Magelang tahun 2021 tepat waktu	√													
		pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2021	LAKIP KPU Kota Magelang tahun 2021 tepat waktu	√													
		terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LAKIP 2021	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP 2021	√													
V	Penguatan Pengawasan																	
1	Pengendalian Gratifikasi mensosialisasikan	Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Sosialisasi internal pengendalian gratifikasi	Laporan Sosialisasi pengendalian gratifikasi, foto baliho, spanduk, roll banner dan upload konten di medsos				√	√	√								TIM PENGAWASAN
Memasang baliho, spanduk, roll banner, dan pembuatan konten tentang tolak gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Magelang										√	√	√						
Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan		Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, memasang baliho, spanduk, roll banner, di lingkungan Sekretariat KPU Kota Magelang	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, baliho, spanduk, roll banner, dan Foto							√	√	√						
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kota Magelang	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kota Magelang	Kartu Kendali SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	√													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	√												√
		SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	1. Sosialisasi SPIP 2. Penyusunan Perubahan Penyelenggaraan Penyusunan SPIP Tahun 2022	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi			√	√									
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Penyediaan kotak aduan Lapor KPU, dan kanal pengaduan masyarakat secara online melalui website KPU Kota Magelang	Foto kotak aduan dan tangkapan layar kanal pengaduan online pada website KPU Kota Magelang	√			√									
		Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan						√							√
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi						√							√
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat						√							√
4	Whistle Blowing System	Whistle Blowing System sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Whistle Blowing System, serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPLJ Kota Magelang dengan cara berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah	Laporan sosialisasi internal Whistle Blowing System di KPU Kota Magelang				√									

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Whistle Blowing System telah diterapkan	Implementasi Whistle Blowing System	Laporan pelaksanaan WBS di Lingkungan KPU Kota Magelang					√	√	√	√	√	√	√	√	
		Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System sudah dilakukan	KPU Kota Magelang menyampaikan laporan ke KPU Provinsi Jawa Tengah tentang evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kota Magelang	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi													√
		Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil Evaluasi yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Tengah	Tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS													√
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kota Magelang berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah	Laporan sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan				√								√	
		Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Kota Magelang melakukan Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Kota Magelang													√
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi	√			√									
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kota Magelang	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan													√
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan													√

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
VI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																		
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar layanan PPID dan RPP					√									TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN	
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik				√											
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang					√										
2	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Penyelenggaraan pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima kepada seluruh pegawai	Laporan pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima kepada seluruh pegawai						√								√	
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial					√										
		Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Pembinaan secara berkala terkait penerapan Budaya Pelayanan Prima, menetapkan SOP atas pelaksanaan layanan	Laporan pembinaan pegawai dan SOP							√				√				√
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	Layanan e-PPID, JDIH, Aplikasi Lindungi Hakmu yang terintegrasi dalam satu website KPU Kota Magelang	Tangkapan layar Layanan e-PPID, JDIH, Aplikasi Lindungi Hakmu					√										
		Terdapat Inovasi pelayanan	Membuat Digitalisasi Data Hasil Pemilu dan Pemilihan	Undangan Rakor, Foto, Daftar Hadir, Notulen dan Tangkapan layar website Digitalisasi Data Hasil Pemilu dan Pemilihan						√									

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Hel desk dan PPID	Hasil Survey												√	√
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Tangkapan layar dari website												√	√
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya												√	√

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dyan Dwi Safitri

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON